

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Jayadi setiabudi, *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya*, Jakarta : Suka Buku, 2012.
- A.P. Perlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sudjito, *PRONA Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofi Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Maria S.W. Sumardjo, *Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya, Mimbar Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.
- Maria S.W. Sumardjo, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- A.P. Perlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Supardi, 2006, *Hukum Agraria*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan, 2006.
- Oloan Sitorus dan Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasi*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- A.P. Perlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung:Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelittian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2002.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutarman, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Malang: Disertasi Airlangga, 2007.

B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penggunaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam.

9. Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9-VIII-1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Pulau lain di sekitarnya.

